

Pemanfaatan DIGI-EDVOT Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat (Upaya Peningkatan Literasi Politik Pada Penyandang Disabilitas)

Muhammad Risal Arifin

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie

*Corresponding author

E-mail: risal.muhammad76@gmail.com

Article History:

Received: April 2023

Revised: April 2023

Accepted: April 2023

Abstract: *Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dan minoritas yang haknya haruslah diakui dan dilindungi. Dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai bentuk penyaluran kedaulatan rakyat yang mana setiap warga negara yang memiliki hak dapat berpartisipasi dalam pemilu. Namun pada pelaksanaannya, hak penyandang disabilitas masih sering diabaikan, sehingga partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, khususnya dalam pemilu begitu rendah. Penelitian ini memiliki fokus pada pengaplikasian digital learning sebagai upaya peningkatan literasi politik penyandang disabilitas. Dimana DIGI-EDVOT merupakan hasil inovasi dalam bidang pendidikan dan politik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini penyandang disabilitas. Dengan DIGI-EDVOT ini diharapkan dapat mampu memberikan pengetahuan literasi politik pada penyandang disabilitas, sehingga mampu meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu mendatang.*

Keywords:

Penyandang Disabilitas, Digital Learning, Literasi Politik, Pemilu

Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang sama dan dijamin oleh negara. Hak tersebut tidak lantas diabaikan begitu saja berdasarkan oleh perbedaan fisik, agama, ras, suku maupun warna kulit (Purinami et al., 2018). Dimana HAM merupakan hak yang bersifat fundamental, dengan begitu keberadaannya harus merupakan keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan dilindungi dan dihormati dari segala macam hambatan dan gangguan dari manusia lain (Zaini, 2020). HAM berlaku untuk seluruh golongan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang salah satunya Penyandang disabilitas.

Penyandang diartikan sebagai orang yang menderita sesuatu, sedangkan disabilitas diartikan sebagai keadaan yang membatasi dan/atau merusak kemampuan mental dan fisik seseorang (Ndaumanu, 2020). Dengan kata lain, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, sensorik, dan/atau intelektual dalam jangka waktu lama (Mustika & Pradikta, 2022).

Penyandang disabilitas mereka yang memiliki keterbatasan sehingga

menghambatnya dalam berbagai kegiatan di lingkungan sosial (Allo, 2022). Permasalahan eksternal lainnya bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai disabilitas, stigma, isolasi, dan kurangnya peran masyarakat dalam penanganan disabilitas (Anggraeni & Sukmono, 2019). Dengan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, tidak sedikit dari mereka menerima berbagai bentuk diskriminasi.

Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara (Trimaya, 2016). Namun pada kenyataannya, masih terjadi pengabaian hak penyandang disabilitas, sehingga masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, pelayanan dalam masyarakat, pendidikan inklusif, dan bahkan pemenuhan kebutuhan dasar (Apsari & Raharjo, 2021).

World Health Organization (WHO) melaporkan sekitar 1,3 miliar manusia di dunia menyandang disabilitas pada tahun 2021 (Kamenov et al., 2022). Sementara itu, menurut laporan Badan Pusat Statistika (BPS) di Indonesia sendiri sekitar 22,5 juta masyarakat pada tahun 2020 menyandang disabilitas (Gandhawangi, 2023). Dari tingginya angka penyandang disabilitas di Indonesia, diperlukan perhatian khusus agar hak-hak penyandang disabilitas dapat tersalurkan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dalam menyalurkan potensinya dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara; mendapatkan perlindungan; mendapatkan aksesibilitas sebagai upaya memudahkan penyandang disabilitas mewujudkan kesamaan kesempatan.

Salah satu bentuk penyaluran hak penyandang disabilitas dalam aspek penyelenggaraan negara adalah keikutsertaan atau partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya, diantaranya: mendapatkan akses dalam menentukan pilihannya; mendaftar dan terdaftar sebagai pemilih; dan hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu (Sabatini, 2018). Dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas dalam pemilu, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana selama penyelenggaraan pemilu (Nuraeni et al., 2021). Hak-hak ini haruslah dijamin oleh negara, agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan dalam berpartisipasi dalam pemilu.

Aksesibilitas sendiri merupakan kemudahan yang disediakan dan diberikan bagi orang yang membutuhkan agar mendapatkan layanan yang relevan (Aniyati et al., 2019). Begitu pula dalam pemilu, aksesibilitas dibutuhkan agar memudahkan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi. Pada dasarnya aksesibilitas merupakan salah satu factor yng menyebabkan penyandang disabilitas belum dan bahkan tidak memberikan suaranya secara maksimal dalam pemilu (Dwintari, 2021). Termasuk aksesibilitas informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Aksesibilitas informasi merupakan salah satu factor dalam keikutsertaan atau partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Salah satu bentuk informasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas adalah literasi politik dalam hal ini pendidikan pemilu. Dimana literasi politik sendiri merupakan pemahaman dan/atau pengetahuan mengenai proses politik dan isu-isu politik yang memungkinkan warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya sebagai warga negara (Sutisna, 2017). Literasi politik yang diberikan harus mengedepankan independensi dan integritas seraya menjauhi model doktrinasi propaganda yang menyempitkan daya nalar kritis para pemilih, termasuk penyandang disabilitas (Ridha & Riwanda, 2020).

Pemberian edukasi literasi politik yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemilu (Arifin et al., 2023). Karena peran dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih terbilang terbatas (Rengganis, 2019). Dengan literasi politik yang ramah dan didesain khusus untuk penyandang disabilitas diharapkan mampu meningkatkan peran dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan atas dasar kurangnya informasi dan/atau literasi politik pada penyandang disabilitas, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi mereka dalam pemilu. Pengabdian ini memanfaatkan *digital learning* sebagai basis informasi literasi politik yang kiranya dibutuhkan oleh penyandang disabilitas menuju pemilu mendatang. Adapun nama produk yang merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah DIGI-EDVOT (*Digital learning for disabled young voters*). Diharapkan dengan adanya DIGI-EDVOT ini dapat mampu meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas mengenai literasi politik dalam hal ini pendidikan pemilu, sehingga dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif dilakukan untuk menentukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan kiranya dampak yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Fadli, 2021). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori kritis. Yang mana penelitian yang menggunakan pendekatan teori kritis harus memperoleh pengetahuan mengenai desain apa yang ada dan apa yang harus ada sehingga terjadi pembentukan pengetahuan untuk mendorong dan menghasilkan perubahan yang lebih baik (Kaharuddin, 2021). Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk membahas lebih dalam terkait penelitian yang dilakukan melalui observasi, analisis, studi pustaka dari berbagai jurnal.

Penelitian ini meneliti terkait penggunaan DIGI-EVOT sebagai sarana edukasi literasi politik dalam hal ini pendidikan pemilu. DIGI-EDVOT sendiri merupakan hasil inovasi pengabdian kepada masyarakat berbasis *digital learning*, sebagai upaya peningkatan literasi politik pada penyandang disabilitas. Penelitian ini memuat proses analisis kebutuhan dengan meninjau dari berbagai literatur dan memuat fitur-fitur

DIGI-EDVOT yang kiranya membantu penyandang disabilitas dalam mengakses literasi politik.

Hasil

Kompleksitas Informasi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas informasi merupakan salah satu factor dalam keikutsertaan atau partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Salah satu bentuk informasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas adalah literasi politik dalam hal ini pendidikan pemilu. Pemberian edukasi literasi politik yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemilu (Arifin et al., 2023). Bentuk pemberian literasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan menyelenggarakan sosialisasi kepemiluan (Megawati & Padang, 2020).

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu terhadap penyandang disabilitas jauh dari kata inklusif, hal ini dikarenakan ditemukannya beberapa temuan dalam beberapa literatur sebagai berikut:

Tabel 1. Kompleksitas Informasi Penyandang Disabilitas

NAMA	JUDUL	TEMUAN/HASIL PENELITIAN
(Amrurobbi et al., 2021)	Tantangan Pemilih Difabel Dalam Pelaksanaan Pemilih Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan SIGAB, SAPDA, dan PERTUNI, ditemukan bahwa terdapat hal penting yang diharapkan dalam pelaksanaan pemberian literasi politik, yang diantaranya: pendidikan pemilih diharapkan dapat mampu menciptakan warga negara yang aktif dan kritis dalam memilih partai politik dan kandidat dalam pemilu; serta literasi politik diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih.
(Irawan & Nurmanto, 2022)	Kelompok Rentan dan Tantangan Pemilu Inklusif 2024: Studi Kasus Perilaku Pemilih Pada Komunitas Masyarakat	Pelaksanaan dan metode sosialisasi dan informasi yang kurang inklusif, dimana materi kampanye, visi misi kandidat kurang dapat diakses tuna rungu

	Dayat Bumi Segandu Indramayu	wicara. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penerjemah untuk memberikan pemahaman materi informasi oral yang disampaikan.
(Maulana et al., 2019)	Pemenuhan Hak politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum	Selama ini penyelenggara pemilu dalam memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas hanya sebatas mengenai hal untuk memilih dan tata acara pemilihan. Hambatan yang muncul dari penyelenggara pemilu sendiri adalah kesulitan dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas.
(Noviani et al., 2021)	Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019	Penyebab rendahnya partisipasi pemilih disabilitas di Kota Aceh sebagaimana hasil wawancara dengan KIP Kota Banda Aceh adalah sosialisasi kepemiluan yang dilakukan belum secara menyeluruh ke penyandang disabilitas. KIP hanya melakukan sosialisasi kepada disabilitas yang tergabung dalam suatu komunitas, sedangkan yang tidak tergabung dalam komunitas tidak pernah diundang untuk mengikuti sosialisasi pemilu 2019.
(Putranti et al., 2022)	Problematik Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik pada Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2020	Permasalahan disabilitas di beberapa daerah masih mengalami masalah, seperti halnya dalam penelitian yang menunjukkan adanya kelemahan pada tahapan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas di Kedamatan Karawang Timur. Hal ini berakibat pada tingkat partisipasi pemilih disabilitas menjadi rendah.

Hasil kajian dari berbagai literatur diatas menunjukkan bahwa masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi pada penyandang disabilitas. Disisi lain, sosialisasi yang diberikan masih jauh dari kata inklusif karena belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh pada penyandang disabilitas. Dari kurangnya pemberian literasi politik melalui sosialisasi ini mengakibatkan kurangnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Menuju pemilu 2024 mendatang, diperlukan pemberian literasi politik pada penyandang disabilitas secara maksimal dan menyeluruh. Dengan begitu angka partisipasi penyandang disabilitas dapat meningkat.

DIGI-EVOT

DIGI-EDVOT (*Digital learning for disabled young voters*) merupakan hasil inovasi pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi internet atau digital. DIGI-EDVOT ini didesain untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam memperoleh dan meningkatkan literasi politik. DIGI-EDVOT juga didesain untuk menyediakan informasi literasi politik, baik itu informasi system pemilu; tahapan pemilu; hak dan kewajiban pemilih; partai politik; profil peserta pemilu; dan lain sebagainya yang kiranya dibutuhkan dalam pemberian literasi politik.

DIGI-EDVOT sendiri merupakan hasil inovasi, konsep dan pengembangan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam perjalanannya, tim mahasiswa Prodi Ilmu Politik dibentuk pada November 2022 dengan fokus pengabdian masyarakat pada penyandang disabilitas. DIGI-EDVOT pertama kali di konsepkan pada Januari 2023, hingga pada akhir Februari 2023 DIGI-EDVOT memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan nomor pencatatan 000450455. Pengabdian ini diharapkan akan terus berlanjut dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyandang disabilitas dapat dibekali dengan literasi politik.

DIGI-EDVOT merupakan media pembelajaran literasi politik berbasis teknologi yang dikenal sebagai *digital learning*. Dimana *digital learning* diartikan sebagai proses pembelajaran dengan memanfaatkan basis elektronik atau digital. *Digital learning* lahir akibat adanya transformasi pendidikan konvensional menjadi bentuk digital baik itu secara konten dan juga sistemnya (Setyoningsih, 2015). Penggunaan *digital learning* dalam proses pembelajaran dianggap lebih mudah dan efisien, dimana pengguna dapat bebas mengakses objek pembelajaran; pembelajaran dilakukan lebih interaktif; akses yang mudah; dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang (Agustina, 2013).

DIGI-EDVOT dapat diakses melalui *website* dengan bantuan internet karena didesain dalam bentuk *mobile web* berbasis *browser*. DIGI-EDVOT didesain ramah disabilitas dengan berbagai fitur pembelajaran di dalamnya. Literasi politik yang dimuat dalam DIGI-EDVOT diharapkan dapat mampu meningkatkan pengetahuan politik penyandang disabilitas, sehingga membantu dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu 2024.

Tabel 2. Fitur-Fitur DIGI-EDVOT

Fitur DIGI-EDVOT	Keterangan
<i>Video Learning</i>	<p>Fitur <i>Video Learning</i> sesuai dengan namanya dimuat dalam bentuk video yang pastinya berisi literasi politik. Adapun fitur ini dibagi menjadi dua kategori, yang diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Video Animasi Pembelajaran literasi politik akan ditampilkan dalam bentuk animasi dan/atau gambar visual, sehingga membuat pembelajaran akan semakin menarik. Video animasi juga diharapkan membantu disabilitas tuna netra dalam mengakses informasi karena video animasi dibarengi dengan audio. 2. Video Peraga Dalam fitur ini, didesain khusus untuk disabilitas tuna rungu wicara. Dimana dalam video pembelajaran akan melibatkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) sebagai <i>informer</i> atau dalam menyampaikan pembelajaran sehingga akan lebih mudah dipahami oleh disabilitas tuna rungu wicara.
<i>Text Learning</i>	<p>Fitur <i>Text Learning</i> dimuat dalam bentuk teks dari pembelajaran literasi politik. Dimana penyandang disabilitas dapat mengakses fitur ini sebagai pilihan dalam fitur pembelajaran yang diminatinya.</p>
<i>Quiz</i>	<p>Fitur <i>Quiz</i> dihadirkan sebagai pengukur pengetahuan literasi politik penyandang disabilitas mengenai pemilu. Melalui fitur <i>Quiz</i> ini dapat mengetahui seberapa jauh dan siap penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu nantinya. Masing-masing pertanyaan memiliki skor yang akan ditampilkan diakhir setelah menjawab seluruh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan akan terus di-<i>update</i> mengikuti perjalanan menuju pemilu 2024.</p>
<i>Costumer Service</i>	<p>Fitur <i>Costumer Service</i> dihadirkan sebagai wadah penyaluran berbagai pertanyaan dan masukan pengguna dalam hal ini penyandang disabilitas.</p>

Penggunaan DIGI-EDVOT sebagai media pembelajaran literasi politik, dapat di manfaatkan sebagai bentuk sosialisasi kepemiluan sehingga dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2024. Dari fitur-fitur yang disediakan dapat memudahkan dan membantu penyandang disabilitas dalam mengakses literasi politik yang dimuat dalam DIGI-EDVOT. Dengan penggunaan secara maksimal dan efektif dapat meningkatkan pengetahuan literasi politik penyandang disabilitas.

Kesimpulan

DIGI-EDVOT (*Digital learning for disabled young voters*) merupakan hasil inovasi pengabdian kepada masyarakat. DIGI-EDVOT merupakan pembelajaran literasi politik berbasis teknologi, dimana dalam dunia pendidikan dikenal sebagai *digital learning*. Pembelajaran melalui *digital learning* dianggap lebih efisien dan efektif karena tidak terbatas waktu dan ruang, sehingga dapat diakses kapan saja.

DIGI-EDVOT yang berisikan literasi politik didesain untuk memudahkan dan membantu penyandang disabilitas dalam mengakses dan meningkatkan pengetahuan politik dalam hal ini pendidikan pemilu. Dengan dibekali nya pengetahuan tersebut diharapkan dapat mampu meningkatkan angka partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Adapun harapan dilakukannya pengabdian ini pastinya dapat membantu dan memudahkan penyandang disabilitas dalam pemilu. Mengingat partisipasi penyandang disabilitas masih sering diabaikan dalam pelaksanaan pemilu. Diharapkan adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pengembangan DIGI-EDVOT dapat dilakukan secara maksimal.

Daftar Referensi

- Agustina, M. (2013). Pemanfaatan E-Learning sebagai Media Pembelajaran. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2013*, G8–G12.
- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 807–812. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>
- Amrurobbi, A. A., Pahlevi, M. E. T., & Kalpiando, R. (2021). Tantangan Pemilih Difabel Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 125–140.
- Anggraeni, D. M., & Sukmono, F. G. (2019). Representasi Kelompok Minoritas Disabilitas Netra Dalam Film Dokumenter The Unseen Words. *Jurnal Interaksi*, 3(2), 180–199.
- Aniyati, D. R., Agiati, R. E., & Sakroni. (2019). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan*

- Pekerjaan Sosial*, 1(2), 143–170.
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159–169. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>
- Arifin, M. R., Angelita, Salmah, N., Lestari, N. P. I. J., & Naali, S. (2023). Pemanfaatan DIGI-EDVOT (Digital Learning For Disabled Young Voters) Bagi Pemilih Disabilitas di Pemilu 2024. *JIPOSTER: Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 2(1), 15–27.
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *JISIP-UNJA Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(1), 29–51.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Gandhawangi, S. (2023, January 3). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>
- Irawan, D., & Nurmanto, M. . A. (2022). Kelompok Rentan dan Tantangan Pemilu Inklusif 2024 Studi Kasus Perilaku Pemilih Pada Komunitas Masyarakat Dayak Bumi Segandu Indramayu. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(1), 102–120. www.journal.kpu.go.id
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kamenov, K., Barrett, D., Pearce, Emma, & Cieza, A. (2022). *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*.
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2019). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), 141–151. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>
- Megawati, & Padang, A. T. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *SIYASATUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(3), 522–532.
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 1–19. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/>

- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019. *PERSPEKTIF*, 10(1), 88–99. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074>
- Nuraeni, A., Purwanti, D., & Amirullah, M. R. (2021). Partisipasi Politik Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1341–1348.
- Purinami, G., Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234–244.
- Putranti, H. R. D., Christiani, C., & Pudjiarti, E. S. (2022). Problematik Akseibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik Pada Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020. *JPPMI Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 72–84.
- Rengganis, V. M. S. (2019). Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan dan Solusinya di Kabupaten Sleman. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 82–103. www.journal.kpu.go.id
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110–121. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Sabatini, A. (2018). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Di Kecamatan Tenayan Raya. *JOM FISIP*, 5(1), 1–14.
- Setyoningsih. (2015). E-learning: Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi Informasi. *Elementary*, 3(1), 39–58.
- Sutisna, A. (2017). Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 135–146.
- Trimaya, A. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–410.
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan*

Politik, 11(1), 13–48.